# BAB I

**PENDAHULUAN**

# Latar Belakang Penelitian

Penyadapan atau sering disebut spionase menjadi isu terhangat saat ini dalam hubungan internasional terutama bagi negara – negara besar seperti Amerika Serikat dalam memenuhi kepentingan nasionalnya terhadap negara lain, baik kepentingan militer, ekonomi maupun kepentingan politik.[[1]](#footnote-1) Biasanya penyadapan tidak serta - merta langsung dilakukan oleh negaranya, melainkan melalui badan - badan intelijen yang dapat dipercaya negara bersangkutan. Di Negara Amerika Serikat banyak sekali badan - badan intelijen yang terkemuka seperti CIA, dan NSA. Baru - baru ini NSA (National Security Agency) melakukan penyadapan terhadap negara sekutu Amerika Serikat yaitu negara Jepang. Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau yang kita kenal NSA (National Security Agency) telah lama memata - matai Jepang. NSA bukan hanya melakukan tindakan spionase terhadap para politisi yang berpengaruh di negara Jepang, melainkan juga bankir terkenal dan perusahaan - perusahaan besar, seperti Mitsubishi. Ini melengkapi daftar panjang negara - negara sahabat yang dimata-matai Amerika Serikat, sebelumnya sempat juga terjadi tindakan spionase terhadap negara : Inggris, Jerman, dan Perancis yang menciptakan ketegangan hubungan di antara negara - negara tersebut.[[2]](#footnote-2) Kita tentunya merasa janggal , Amerika Serikat memata - matai negara sahabatnya sendiri . Biasanya yang dimata - matai oleh suatu negara adalah negara - negara yang bermusuhan, atau secara politik memiliki posisi yang berlawanan, sedangkan yang dilakukan di antara negara sahabat biasanya adalah tukar - menukar informasi intelijen. Dalam kaitan itulah, penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara - negara sahabatnya sulit diterima. Meskipun penyadapan ini bukan hal yang baru bagi kedua negara karena pernah terjadi pada saat Perang Dingin berlangsung. Pada saat itu, tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi saat ini yaitu Amerika Serikat memata – matai perusahaan besar Jepang Toshiba, walaupun hal tersebut sangat sulit diterima, masih bisa kita mengerti seandainya Amerika Serikat memang melakukannya. Dengan alasan, pada masa Perang Dingin (1947-1991), Toshiba, salah satu perusahaan besar Jepang, secara diam - diam melanggar larangan untuk menjual propeler kapal selam kepada Uni Soviet (kini, Rusia), yang pada masa itu adalah musuh besar Amerika Serikat. Jepang adalah sahabat Amerika Serikat, seharusnya Toshiba tidak melanggar larangan itu. Amerika Serikat sangat dirugikan oleh penjualan propeler Toshiba kepada Uni Soviet.[[3]](#footnote-3) Propeler yang dibuat Toshiba itu sangat maju sehingga Amerika Serikat tidak dapat mendeteksi kehadiran kapal selam Uni Soviet di dekatnya karena kesenyapannya. Fakta bahwa Amerika Serikat memata - matai negara sahabatnya itu memang sulit diterima. Akan tetapi, kita juga tidak boleh melupakan bahwa fakta penyadapan yang diungkap oleh media internasional pembocor rahasia bernama Wikileaks yang terjadi pada periode tahun 2006 – 2012 benar – benar terjadi. Dalam pengungkapan terbaru mengenai pengintaian Washington terhadap sekutu - sekutunya, penyadapan itu membongkar spionase Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, dengan menyusul dokumen - dokumen lain yang menunjukkan aksi memata - matai sekutunya tersebut termasuk negara Jepang yang juga merupakan salah satu sekutu utama Washington di kawasan Asia Pasifik dan mereka secara teratur melakukan konsultasi mengenai isu - isu pertahanan, ekonomi dan perdagangan.[[4]](#footnote-4) Laporan itu menunjukkan dalamnya pemantauan Amerika Serikat terhadap pemerintah Jepang, mengindikasikan bahwa laporan intelijen dikumpulkan dan diproses dari sejumlah kementerian dan kantor - kantor pemerintah Jepang. Dokumen - dokumen itu menunjukkan pengetahuan mendalam mengenai perundingan internal Jepang terkait isu - isu perdagangan, nuklir, dan kebijakan perubahan iklim, serta hubungan diplomatik Tokyo dan Washington, perubahan “iklim” serta "isi arahan rahasia” perdana menteri yang dilakukan di kediaman resmi (Perdana Menteri) Shinzo Abe. Tidak terjadi penyadapan spesifik terhadap Shinzo Abe, namun para politisi senior di Jepang yang menjadi target NSA (National Security Agency), termasuk Menteri Perdagangan Yoichi Miyazawa, sementara gubernur bank sentral Jepang Haruhiko Kuroda juga berada di bawah pemantauan intelijen Amerika Serikat. Klaim atas aksi memata - matai para pejabat perdagangan itu muncul di saat – saat sensitif, setelah dimulainya pertemuan tingkat tinggi di Hawaii, yang bertujuan untuk menuntaskan pembentukan blok besar perdagangan bebas yang mencakup 40% perekonomian dunia.[[5]](#footnote-5) Amerika Serikat, Jepang, dan 10 negara Pasifik lain berharap bisa menyepakati kesepakatan dagang paling ambisius dalam beberapa dasawarsa ini. Namun, Washington dan Tokyo yang sejauh ini merupakan sektor ekonomi terbesar dalam negosiasi ini berselisih pendapat mengenai akses sektor otomotif dan keinginan Tokyo untuk melindungi produk - produk pertanian dari usulan rekanan Trans - Pasifik. Aksi mata - mata itu dilakukan sejak periode pertama pemerintahan Abe yang dimulai pada 2006. Abe kembali berkuasa pada akhir 2012. Kelompok pengungkap aib ini mengatakan empat laporan diklasifikasikan sebagai "sangat rahasia", sementara satu lagi ditandai untuk menandakan bahwa ia bisa dirilis kepada negara". Dalam dokumen - dokumen ini mereka melihat pemerintah Jepang mengkhawatirkan mengenai seberapa banyak informasi rahasia yang diketahui Amerika Serikat yang dapat merusak usulan perubahan iklim atau hubungan diplomatik. Amerika Serikat yang telah mencuri dan membaca segala informasi, serta menyebarkan perundingan para pemimpin Jepang kepada negara Australia, Kanada, Selandia Baru dan Inggris.

Sebelum terungkapnya peristiwa spionase ini, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada tanggal 24 Juni 2015 telah menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik penyadapan terhadap negara - negara sekutunya. Penegasan Obama itu disambut dengan perasaan lega.[[6]](#footnote-6) Negara - negara yang dimata - matai Amerika Serikat berpendapat bahwa Amerika Serikat perlu menyadari bahwa persahabatan hanya dapat dibangun di atas rasa saling percaya dan rasa saling menghormati satu sama lain. Namun, tidak dapat dipungkiri, penyadapan bukan hal yang baru apalagi bagi negara besar seperti Amerika Serikat, mengingat kepentingan nasional Amerika Serikat saat ini terhadap negara yang dianggapnya menjadi pesaing dan berpotensi menjatuhkan Amerika Serikat sebagai negara hegemon terutama dalam bidang ekonomi saat ini, peristiwa spionase ini juga sebagai ajang pembuktian diri sebagai negara adidaya yang mampu melakukan hal apapun demi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, tiap - tiap negara harus terus memelihara kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya penyadapan.

Fakta yang menyebutkan NSA menyadap 35 target, termasuk para pejabat tinggi di Jepang, juga menjadi hal yang sangat mengecewakan bagi negara Jepang sebagai negara sekutu Amerika Serikat. Negara Jepang juga terus menuntut klarifikasi dari situasi ini terutama Perdana Menteri Shinzo Abe pada sidang komite khusus di ruang parlemen Jepang, seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo . Penyadapan komunikasi telepon yang menjadi target NSA tersebut, termasuk anggota kabinet Jepang, Bank Sentral, serta kantor kementerian keuangan dan ekonomi Jepang, perusahaan minyak dan gas Jepang Mitsubishi dan Mitsui juga menjadi target penyadapan NSA, hanya ditanggapi oleh Presiden Barrack Obama dengan pernyataan permintaan maafnya terhadap negara Jepang atas penyadapan yang telah dilakukan Badan Keamanan Nasional milik Amerika Serikat. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpuasan dari pihak Jepang walaupun Jepang menerima perrmintaan maaf tersebut untuk menjaga hubungan baik diantara kedua negara tersebut.

1. **Identifikasi Masalah**
2. Apa yang melatarbelakangi NSA melakukan tindakan spionase terhadap negara Jepang?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan dan kebijakan negara Jepang dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah adanya kasus spionase oleh NSA?
4. Bagaimana pengaruh dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan Jepang setelah terjadi tindakan spionase oleh NSA (National Security Agency)?
5. **Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah dalam skripsi yang berjudul “ Dampak Spionase NSA terhadap Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Jepang “ dengan memfokuskan bahasan seputar latar belakang spionase yang dilakukan NSA (Nasional Security Agency) sebagai kegiatan intelijen untuk kepentingan Amerika Serikat karena hubungan yang dijalin antara Amerika Serikat dan Jepang sudah lama terjalin sebagai negara sekutu terutama setelah terjadi banyak kesepakatan dalam perdagangan bebas saat ini, sehingga peristiwa spionase ini menjadi hal yang sangat mengecewakan pihak Jepang karena ada kurangnya rasa percaya negara Amerika Serikat terhadap negara sekutunya sendiri. Periode yang diambil untuk mebatasi masalah spionase NSA ini adalah dari tahun 2006 – 2015 atau terhitung dari dimulainya spionase itu terjadi sampai spionase ini terbongkar oleh Wikileaks dan dibocorkan terhadap negara Jepang.

1. **Perumusan Masalah**

Bagaimana dampak yang terjadi akibat peristwa NSA yang telah melakukan tindakan spionase terhadap negara Jepang?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**
3. Untuk mengetahui hal - hal yang melatarbelakangi NSA (National Security Agency) dalam melakukan tindakan spionase terhadap negara Jepang.
4. Untuk mengetahui hal - hal yang menjadi pertimbangan dan kebijakan negara Jepang dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat setelah adanya kasus spionase oleh NSA (National Security Agency).
5. Untuk mengetahui pengaruh dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan Jepang terhadap Amerika Serikat setelah terjadi tindakan spionase oleh NSA (National Security Agency)?
6. **Kegunaan Penelitian**
7. **Manfaat Akademis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi Ilmu Hubungan Internasional terutama masalah intelejen dalam dunia Internasional dan kegiatannya berupa spionase yang dilakukan Amerika Serikat melalui Badan Keamanan Nasionalnya yaitu NSA terhadap negara - negara sekutunya sendiri khususnya Jepang yang berkaitan dengan *smart power* yang menjadi kebijakan negara Amerika Serikat.

1. **Manfaat Praktis**

Secara praktis diharapkan bahwa apa yang dianalisa dalam penilitian ini dapat berguna sebagai masukan atau saran yang membangun bagi praktisi dan calon praktisi dalam Hubungan Internasional, terutama dalam hal kebijakan suatu negara untuk mengatasi kasus penyadapan atau spionase oleh negara lain.

1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
2. **Kerangka Teoritis**

Untuk lebih mempermudah proses penelitian dan pembahasan, penulis mengemukakan dasar pemikiran yang diperoleh dari teori - teori atau pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian dimana teori - teori dan konsep - konsep dari para ahli tersebut akan digunakan sebagai landasan berpijak penulis dalam mengemukakan kerangka pemikiran, yang diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kerangka pemikiran yang digunakan sesuai dengan masalah yang akan  
diteliti yaitu *Dampak Spionase NSA (National Security Agency) tehadap Hubungan Dilomatik Amerika Serikat dan Jepang* . Sesuai dengan masalah tersebut diatas, maka diperlukan teori - teori dan konsep – konsep ilmiah yang mampu mengarahkan penulis menemukan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interpretasi nantinya.

Kawasan Asia Timur memang merupakan ajang pertarungan negara-negara besar sejak sebelum Perang Dunia I. Ketika pecah Perang Dunia II, negara - negara besar bertarung kembali memperbutkan jalur strategis dan sumber alam yang kaya di kawasan ini. Tidak hanya itu bahkan banyak negara berpindah tangan dari satu penjajah ke penjajah lain. Menjelang pecah Perang Dunia II. Di Asia Timur Laut dapat dikatakan aktor dominan dipegang Jepang dan Cina. Simon membagi dua kategori yakni anggota - anggota inti (core members) dan anggota pinggiran (periperal members). Alasan pembagian dua golongan itu ditentukan atas dasar faktor politik dan ekonomi. Istilah anggota inti merujuk pada negara-negara yang politik luar negerinya menunjukkan daya jangkau dan jarak yang mempengaruhi banyak unsur sistem di kawasan ini. Sedangkan istilah elemen pinggiran merujuk pada kemampuan ekonomi, pergangan yang potensial dan sekarang serta hubungan perdagangan dan investasi dengan angota inti dan yang lainnya. Menurut Simon terdapat empat anggota utama Asia Timur yakni Jepang, Cina, Indonesia dan Vietnam. Ia mengambil kesimpulan itu setelah melihat sejumlah indikator mulai dari jumlah penduduk, ekonomi dan volume perdagangannya. Dua negara besar yang berperang besar dalam pembentukan kawasan ini adalah Cina dan Jepang. Jika Cina memiliki kapasitas yang bisa jadi negara besar di masa mendatang karena pertumbuhan dan stabilitas ekonominya, Jepang sudah membuktikan diri sangat kuat dalam ekonomi Menurut Simon lagi, negara - negara peripheral atau pinggiran adalah yang tidak tampak memprakarsai perkembangan politik kawasan. Namun mereka terpengaruh oleh kecenderungan regional. Dengan kata lain meskipun aktor - aktor ini eksis di kawasan namun karena kapabilitas politik, militer dan ekonomi tidak begitu siginifikan maka faktor - faktor aktor utama sering mempengaruhi perilaku eksternal mereka. Anggota pinggiran suatu kawasan tampaknya banyak menyesuaikan diri dengan aktor dominan regional. Mereka biasanya mengakomodasi kepentingan negara besar atau yang berpengaruh di kawasannya. Bila timbul ketegangan pun biasanya aktor dalam kawasan ini mencari pelindung kepada aktor dominan sistem internasional untuk mengimbangi aktor lainnya yang mengancam dirinya. Maka dari itu, tidak heran terjadi aksi mata – mata terhadap negara Jepang oleh negara sekutunya sendiri yaitu Amerika Serikat mengingat posisi Jepang di kawasan Asia Timur termasuk negara yang kuat dan cukup dominan baik dalam segi ekonomi maupun politik. Penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) ke banyak negara, mengundang protes dari masyarakat internasional, terlebih oleh pemerintah negara setempat. Tak kurang dari 30 negara menjadi korban penyadapan Gedung Putih, termasuk Jepang. Berbagai bentuk protes pun dilayangkan oleh pemerintah negara setempat. Prancis menunda perundingan perdagangan Uni Eropa dengan Amerika hingga masalah penyadapan ini terungkap jelas. Jerman juga menyuarakan protesnya setelah mengetahui telepon seluler Perdana Menteri Angela Merkel disadap. Brazil tak kalah gerah menyikapi kasus penyadapan ini. Bahkan, Dilma Roussef, presiden Brazil, sampai membatalkan kunjungan kenegaraan ke Amerika begitu mengetahui Brazil menjadi salah satu bidikan penyadapan oleh National Security Agency (NSA). Menurut pakar Teori Politik Internasional, Ali Muhammad, Ph.D, satu - satunya faktor yang mendasari Amerika melakukan penyadapan ini adalah faktor keamanan. Saling ketidakpercayaan terhadap negara - negara lain menjadi alasan AS menggunakan segala cara untuk melindungi segala kepentingan nasionalnya, walaupun bertentangan dengan hukum internasional.

1. Hubungan Internasional

Fenomena yang terjadi di dunia ini telah menegaskan bahwa bagian - bagian dunia negara negara ini telah terhubung antara satu dengan yang lainnya, interaksi yang terjadi melahirkan sebuah konsepsi baru bahwa tidak mungkin satu negara mampu mencukupi kebutuhan dan kepentingannya seorang diri. Hakikat negara sama halnya dengan manusia, dimana hubungan antar yang satu dengan yang lain harus menjalin hubungan untuk memenuhi kehidupannya. Keharusan dalam berinteraksi ini menciptakan satu sistem dunia internasional, dimana aktor negara dan aktor bukan negara sebagai sub - sistemnya. Perkembangan sistem dunia internasional di dalam memahami dinamika interaksi antar anggota masyarakat internasional, memaksa setiap negara untuk memahami arti penting hubungan antarbangsa. Dari hal tersebut diatas, maka dapat menemukan suatu pandangan baru bagi masyarakat internasional sebagai jawaban dalam rangka memenuhi baik untuk kebutuhan hidup dari bangsa itu sendiri maupun untuk kebutuhan hidup bersama. Hubungan antar bangsa dan berkembang menjadi Hubungan Internasional merupakan penjabaran dari :

**“Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek Internasional** **dari beberapa cabang ilmu pengetahuan, arah baru dari Politik** **Internasional, semua aspek sosial kehidupan manusia yang terjadi** **atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah** **laku manusia, di negara lain, suatu cabang ilmu pengetahuan yang** **berdiri sendiri.”[[7]](#footnote-7)**

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama *(cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya. Hubungan Internasional merupakan hubungan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain dengan negara lain. Menurut Perwita dan Yani, menjelaskan Hubungan Internasional sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas - batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (2005 : 3 - 4).”**

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan Negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Hubungan internasional juga mencakup kelompok - kelompok bangsa dalam masyarakat. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

**“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (2005 : 3 - 4).”[[8]](#footnote-8)**

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara - negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks. Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu - isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

**“Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional” (2005 : 7 - 8).”**

1. Realisme

Penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) ke banyak negara, mengundang protes dari masyarakat internasional, terlebih oleh pemerintah negara setempat. Tak kurang dari 30 negara menjadi korban penyadapan Gedung Putih, termasuk Jepang. Berbagai bentuk protes pun dilayangkan oleh pemerintah negara setempat. Prancis menunda perundingan perdagangan Uni Eropa dengan Amerika hingga masalah penyadapan ini terungkap jelas. Jerman juga menyuarakan protesnya setelah mengetahui telepon seluler Perdana Menteri Angela Merkel disadap. Brazil tak kalah gerah menyikapi kasus penyadapan ini. Bahkan, Dilema Roussef, presiden Brazil, sampai membatalkan kunjungan kenegaraan ke Amerika begitu mengetahui Brazil menjadi salah satu bidikan penyadapan oleh National Security Agency (NSA). Hingga terakhir Negara Jepang melalui Perdana Menterinya Shinzo Abe meminta klarifikasi atas penyadapan (spionase) yang dilakukan Badan Keamanan Nasional/ NSA (National Security Agency) Amerika Serikat, yang ditanggapi oleh Presiden Obama dengan permintaan maafnya. Menurut pakar Teori Politik Internasional, Ali Muhammad, Ph.D, satu-satunya faktor yang mendasari Amerika melakukan penyadapan ini adalah faktor keamanan. Saling ketidakpercayaan terhadap negara- negara lain menjadi alasan AS menggunakan segala cara untuk melindungi segala kepentingan nasionalnya, walaupun bertentangan dengan hukum internasional. Realisme dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat Realisme dibangun berdasarkan anggapan bahwa individu pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan cenderung mencari kekuasaan. Amerika Serikat begitu menghayati pemikiran - pemikiran Realisme dalam pergaulannya di dunia Internasional. Realisme memandang dunia ini anarkis, penuh konflik, dan saling ketidakpercayaan tinggi antar negara, sehingga memungkinkan antar negara saling berperang. Karena itu fokus utama negara-negara adalah bagaimana mereka bertindak untuk menghadapi ketidakamanan atau insecurity tersebut. *Struggle for power*, petuah Morghentau, tidak dapat dihentikan dan menjadi karakteristik permanen. Prinsip *balance of power* lalu diyakini sebagai upaya untuk menghadapi dunia yang anarkis ini. Negara - negara harus berupaya menyeimbangkan kekuatan dengan negara lain serta menjalankan politik *deterrence* untuk mengamankan sistem internasional. Setiap negara pun harus menerapkan standar kewaspadaan yang tinggi terhadap negara lain. Semua kriteria ini masuk dalam karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat. Jauh sebelum isu penyadapan ini muncul ke permukaan, Amerika Serikat telah melakukan usaha - usaha demi memperkuat pertahanan dan keamanan negaranya. Paham Machiavelli yang selaras dengan realisme diterapkan melalui legalisasi segala cara demi melindungi kepentingan nasionalnya. George Walker Bush, Jr. adalah salah satu presiden Amerika yang memfokuskan politik luar negeri Amerika Serikat ke pertahanan dan keamanan. Jutaan dolar digelontorkannya hanya demi sebuah skuad militer ideal yang mampu membentengi Amerika Serikat dari pengaruh-pengaruh negatif negara lain. Terbukti, militernya menjadi yang terwahid di dunia. Demi alasan *balance of power* pula lah Amerika Serikat melakukan penyadapan di negara-negara yang dianggapnya berpengaruh terhadap kepentingan nasional mereka. Tidak peduli apakah negara tersebut bersekutu dengannya atau tidak. Ambil contoh Jerman. Negara ini bersahabat lama dengan Amerika Serikat, namun masih juga menjadi sasaran penyadapan oleh kubu Obama. Maka, dapat dipahami kemudian jika pemerintahan Jerman berang atas perlakuan Amerika ini. Realisme mendefinisikan power dalam konteks sumber daya materi yang dapat digunakan untuk memaksa pihak lawan. Demikian juga yang dilakukan Amerika Serikat melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi, hingga bisa mengontrol telekomunikasi di negara yang terpisahkan samudera tanpa diketahui oleh negara yang bersangkutan. Sebagai negara superpower, tak sulit bagi Amerika menciptakan komunitas peretas yang ditugaskan resmi oleh badan legal untuk mengawasi gerak - gerik pemerintahan negara-negara di dunia. Dengan membandingkan unsur - unsur dasar pemikiran realis dengan politik luar negeri Amerika Serikat, maka tak sulit memetakan maksud dan tujuan penyadapan oleh Amerika Serikat ke negara - negara di dunia tanpa terkecuali. Reaksi Amerika Serikat terhadap konstelasi politik internasional yang anarkis diimplementasikan ke upaya pertahanan dan keamanan, baik dalam maupun luar negeri, yaitu menyadap telekomunikasi pemerintah - pemerintah pusat serta tokoh – tokoh penting negara bidikan.

Kita dapat melihat kasus penyadapan Amerika Serikat melalui Badan Nasional Keamanannya dilihat dari perspektif realisme.[[9]](#footnote-9) Realisme adalah salah satu perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mengalami banyak perkembangan. Realisme klasik menawarkan konsep raison d’etat (*state excuse*), dimana negara memiliki dalih untuk melindungi negaranya (Sebagaimana doktrin militer *pre - emptative strike* Amerika Serikat pada masa *postcontaintment* Perang Dingin).[[10]](#footnote-10) Machiavelli dan Thucydides sebagai tokohnya yang setuju bahwa kondisi manusia tidak aman dan penuh konflik, adanya kumpulan pengetahuan politik/ kebijaksanaan untuk menghadapi masalah keamanan, dan tidak ada solusi permanen atau akhir dari masalah politik. Perspektif realis banyak membahas tentang perang dan keamanan yang berkaitan dengan militer dan power. Realisme berkembang dan mendasar pada pemikiran bahwa *man is evil* . Aktor dalam perspektif realisme adalah negara, sebagai satu individual yang tidak akan bekerjasama dengan aktor lain tanpa ada maksud tertentu (*self - interested* ) dan akan selalu berusaha untuk memperkuat dirinya sendiri. Berawal dari sejarah studi Hubungan Internasional yang muncul antara Perang Dunia I dan II, realisme hadir sebagai arus utama pendekatan hubungan internasional akibat ketidaksempurnaan pendekatan idealis. Pandangan - pandangan yang menjadi fundasi aliran ini posisinya berseberangan dengan pemikiran para penganut idealisme. Adapun pandangan atau asumsi dasar dari prespektif realisme[[11]](#footnote-11), antara lain :

1. memandang secara pesimistis terhadap sifat dasar manusia yang cenderung berbuat baik. Prespektif ini berkeyakinan bahwa manusia itu bersifat jahat, berambisi untuk berkuasa, bereperang, dan tidak mau bekerjasama;
2. bersikap skeptis terhadap kemajuan politik internasional dan politik domestik;
3. meyakini bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual atau berpotensi menghasilkan konflik. Dan konflik - konflik internasional yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan jalan perang;
4. menjunjung tinggi nilai - nilai keamanan nasional dan eksistensi atau kelangsungan hidup negara.[[12]](#footnote-12)

Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat yang dibangun berdasarkan anggapan bahwa individu pada dasarnya mementingkan diri sendiri dan cenderung mencari kekuasaan. Amerika Serikat begitu menghayati pemikiran - pemikiran Realisme dalam pergaulannya di dunia Internasional. Realisme memandang dunia ini anarkis, penuh konflik, dan saling ketidakpercayaan tinggi antar negara, sehingga memungkinkan antar negara saling berperang. Karena itu fokus utama negara-negara adalah bagaimana mereka bertindak untuk menghadapi ketidakamanan atau *insecurity* tersebut. *Struggle for power*, petuah Morghentau, tidak dapat dihentikan dan menjadi karakteristik permanen.

1. Prinsip B*alance of Power*

Prinsip *Balance of Power* [[13]](#footnote-13)diyakini sebagai upaya untuk menghadapi dunia yang anarkis ini. Negara tersebut dan dengan kekuatan *balance of power* yang berfungsi sebagai penyeimbang keadaan dunia internasional yaitu pemusatan pada kekuasaan dan proses politik internasionalnya untuk mewujudkan kepentingan nasional negara. Globalisasi adalah bentuk real dari kegiatan suatu negara dalam memperluas kekuasaanya. Fenomena globalisasi ini dapat diartikan bagaimana kerasnya dunia internasional dan membuat suatu negara harus mengusahakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional negara. Dan globalisasi ini dapat diartikan sebagai proses pembawa nilai tertentu dari negara asal untuk dipahami atau diaplikasikan dan suatu keberhasilan apabila nilai tersebut berkuasa di negara tujuan. Meningkatnya ketergantungan ekonomi suatu sistem terhadap sistem lain memunculkan fenomena atau faham-faham kawasan, dimana sistem-negara saling bekerjasama, utamanya dibidang perekonomian. Kemajuan perekonomian suatu sistem tidak terlepas dari upaya di segala bidang dalam mendukung hal tersebut.Negara-negara harus berupaya menyeimbangkan kekuatan dengan Negara lain serta menjalankan politik deterrence untuk mengamankan sistem internasional. Setiap negara pun harus menerapkan standar kewaspadaan yang tinggi terhadap Negara lain. Semua kriteria ini masuk dalam karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat. Jauh sebelum isu penyadapan ini muncul ke permukaan, Amerika Serikat telah melakukan usaha-usaha demi memperkuat pertahanan dan keamanan negaranya. Paham Machiavelli yang selaras dengan realisme diterapkan melalui legalisasi segala cara demi melindungi kepentingan nasionalnya. George Walker Bush, Jr. adalah salah satu presiden Amerika yang memfokuskan politik luar negeri Amerika Serikat ke pertahanan dan keamanan. Jutaan dolar digelontorkannya hanya demi sebuah skuad militer ideal yang mampu membentengi Amerika Seriakt dari pengaruh - pengaruh negatif negara lain. Terbukti, militernya menjadi yang terwahid di dunia. Demi alasan *balance of power* pula lah Amerika Serikat melakukan penyadapan di negara - negara yang dianggapnya berpengaruh terhadap kepentingan nasional mereka. Tidak peduli apakah negara tersebut bersekutu dengannya atau tidak. Ambil contoh Jerman. Negara ini bersahabat lama dengan Amerika Serikat, namun masih juga menjadi sasaran penyadapan oleh kubu Obama. Maka, dapat dipahami kemudian jika pemerintahan Jerman berang atas perlakuan Amerika ini.

1. Power

Realisme juga memfokuskan analisisnya pada power dan otonomi dalam interaksi internasional serta tentang tidak adanya keharmonisan diantara negara-negara, sehingga konsep *self - help* di sini menjadi penting.[[14]](#footnote-14) Negara yang bersifat *self – help* yaitu tidak ada satu negarapun yang berani menjamin eksistensinya secara struktural baik dibidang domestik dan internasional, dalam hal ini tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan nasional negara. Jadi yang didapatkan negara adalah hasil jerih payah mereka sendiri, apa yang ditabur, itulah yang dipetik. Intinya, bahwa satu – satunya aktor yang berperan dalam dunia internasional adalah negara dimana perspektif terhadap dunia bersifat anarkis yang menganggap perang dan damai adalah fenomena dunia yang wajar, yang berangkat dari indivdu yang membentuk

Realisme mendefinisikan power dalam konteks sumber daya materi yang dapat digunakan untuk memaksa pihak lawan. Demikian juga yang dilakukan Amerika Serikat melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi, hingga bisa mengontrol telekomunikasi di Negara yang terpisahkan samudera tanpa diketahui oleh negara yang bersangkutan. Sebagai negara superpower, tak sulit bagi Amerika menciptakan komunitas peretas yang ditugaskan resmi oleh badan legal untuk mengawasi gerak-gerik pemerintahan negara-negara di dunia. Dengan membandingkan unsur-unsur dasar pemikiran realis dengan politik luar negeri Amerika Serikat, maka tak sulit memetakan maksud dan tujuan penyadapan oleh Amerika Serikat ke negara-negara di dunia tanpa terkecuali. Reaksi Amerika Serikat terhadap konstelasi politik internasional yang anarkis diimplementasikan ke upaya pertahanan dan keamanan, baik dalam maupun luar negeri, yaitu menyadap telekomunikasi pemerintah- pemerintah pusat negara bidikan.

1. Keamanan Nasional

Para pemikir realis juga menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas atau fokus utama dalam prespektif realisme. Dalam kacamata realis, keamanan militer dan isu - isu strategis tergolong kepentingan utama dan mengacu ke dalam kategori *high politics*. Sedangkan ekonomi dan isu isu sosial dilihat oleh kaum realis sebagai hal yang biasa, yang termasuk ke dalam kategori *low politics*. Dan kemampuan yang paling relevan, yaitu kemampuan di bidang militer. Realis tidak menolak prinsip - prinsip moral, hanya saja dalam prakteknya, moralitas individual dikalahkan oleh kepentingan akan kelangsungan hidup negara dan penduduknya dan tentu saja kepentingan nasional itu sendiri bagi kaum realis. Keamanan nasional menuntut adanya kemampuan untuk mempertahankan negaranya dari serangan atas wilayah daratan, laut territorial dan wilayah udara, baik serangan yang berasal dari dalam maupun dari luar dan kondisi keamanan regional suatu sistem akan menjadi ystem pendukung dari kondisi keamanan regional atau kawasan. Ketidakstabilan sistem juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan regional Untuk itu diperlukan ketahanan nasional yang kuat dari masing - masing sistem dalam suatu kawasan. Bila sistem negara dalam suatu kawasan dapat menjalankan ketahanan nasionalnya dengan baik maka stabilitas regional dapat pula terjaga. Sehingga dalam hal ini ketahanan nasional dapat berkembang menjadi ketahanan regional, ketahanan regional itulah yang selanjutnya akan mendukung tetap terpeliharanya stabilitas kawasan yang bersumber dari ketahanan nasional.

1. Negara

Negara[[15]](#footnote-15) merupakan aktor utama dalam panggung internasional. Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Seorang realis juga biasanya memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini.[[16]](#footnote-16) Dasar normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai - nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis. Negara dipandang esensial bagi kehidupan warganegaranya: tanpa negara yang menjamin alat-alat dan kondisi - kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan, kehidupan manusia dibatasi menjadi seperti, seperti yang tersurat dalam pernyataan Thomas Hobbes yang terkenal terpencil, miskin, dan sangat tidak menyenangkan, tidak berperikemanusiaan, dan singkat. dengan demikian negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, penduduknya, dan cara hidupnya yang khas dan berharga. Negara bersifat *survival* yaitu tujuan pengorganisasian negara adalah keteraturan dalam mempertahankan kehidupan masyarakat. Jadi *survival* adalah hal yang hakiki dalam dunia internasional dan dalam proses Hubungan Internasional, dimana setiap negara harus dapat bertahan ditengah arus dunia internasional.[[17]](#footnote-17)

1. Kepentingan Nasional

Lebih lanjut Anak Agung dan Yanyan mengutip Jack C. Plano dan Roy Olton, menjelaskan bahwa :

**“Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan** **fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para** **pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan** **kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara** **khas nerupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara** **yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan** **kesejahteraan ekonomi.”[[18]](#footnote-18)**

Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi pada negara dan tidak meluas pada hubungan internasional yang merupakan arena politik dari kekacauan yang besar, perselisihan, konflik antar negara - negara yang berkekuatan besar mendominasi pihak-pihak lain. Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara- negara untuk mematuhinya. Semua negara harus siap mengorbankan kewajiban internasionalnya yang berdasar pada kepentingannya sendiri jika dua negara terlibat dalam konflik. Hal itu menjadikan perjanjian - perjanjian dan semua persetujuan, konvensi, kebiasaan, aturan dan hukum lainnya, antara negara - negara hanyalah berupa pengaturan yang bijaksana yang dapat dan akan dikesampingkan jika semua itu berseberangan dengan kepentingan negara. Tidak ada kewajiban internasional dalam pengertian moral dari kata itu (yaitu terikat kewajiban timbal balik) antara negara-negara merdeka.

1. Teori Neorealisme

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, satu - satunya tanggung jawab mendasar warga negara adalah meningkatkan dan mempertahankan kepentingan nasional Klasifikasi Realisme dan Neorealisme : Kemunculan Mazhab realisme terbagi menjadi dua bagian, yakni realisme atau sering juga disebut dengan realisme klasik dan neo - realisme atau realism kontemporer. Namun, teori HI memiliki tradisi panjang menggunakan karya ilmu - ilmu sosial lainnya Penggunaan huruf besar “H” dan “I” dalam hubungan internasional bertujuan untuk membedakan disiplin Hubungan Internasional dari fenomena hubungan internasional Banyak yang mengutip Sejarah Perang Peloponnesia karya Thucydides sebagai inspirasi bagi teori realis, dengan Leviathan karya Hobbes dan *The Prince* karya Machiavelli memberikan pengembangan lebih lanjut. Pengklasifikaiannnya bisa berdasarkan pada tahun kemunculannya, yaitu klasik (hingga abad 20) dengan Hobbes, Kaum realis klasik hidup dalam banyak periode sejarah yang berbeda; dari Yunani kuno sampai saat ini. Key Thinkers pada jaman itupun sudah banyak mengungkapkan teori tentang realisme politik yang menjadi haluan bagi pemikir-pemikir kunci realisme pada masa sekarang. pemikiran mereka sudah diawali sejak jaman Thucydides (*The Melian Dialogue 460 - 406BC*), Nicollo Machiavelli (1496 - 1527), Thomas. Hobbes (1588 - 1679) dan J.J. Rosseau (1712 - 78), yang disebut *classic - realism* . Hans J. Morgenthau adalah pencetus utama realisme neoklasik. Kutipan yang terkenal mengenai substansi pemikiran Morgenthau adalah :

**“Politik adalah perjuangan untuk kekuasaan atas manusia, dan apapun ya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara - cara memperoleh, memelihara, dan menunjukan kekuasaan menentukan teknik aksi politik. [[19]](#footnote-19)”**

Disini Morgenthau banyak mengungkapkan kritisisme mengenai kepercayaan Woodrow Wilson mengenai kepercayaanya dalam menganalogikan dan “menyarankan” untuk mengaplikasikan etika pribadi kedalam etika politik. Realisme neoklasik sendiri di definisikan oleh Baylis sebagai : “*Drive for power and the will to dominate that are held to be fundamental aspects of human nature realism neo – clasics*.” Dengan Hans Morgenthau sebagai tokoh yg berpendapat, politik dianggap berakar dalam sifat manusia yang *self –* (*centered, regarding, dan interested*) , pemimpin politik tidak mempunyai kebebasan melakukan yang benar seperti rakyatnya, dan rasa pesimis muncul karena keterbatasan manusia. neo klasik realisme pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah dan memfokuskan pada struktur atau sistem internasional. Doktrin ini pada awalnya berawal dan meluas di Amerika meskipun tidak secara khusus memfokuskan analisisnya pada pengejaran terhadap power dan otonomi dalam interaksi internasional dan tidak adanya keharmonisan *interest* diantara negara - negara sehingga konsep *self - help* menjadi penting dan kemampuan yang paling relevan adalah kemampuan dibidang militer. Realis tidak menafikan prinsip - prinsip moral, hanya saja dalam prakteknya moralitas individual dikalahkan oleh kelangsungan hidup negara dan penduduknya serta pencapaian kepentingan nasional.

1. Sistem Internasional Neo - Realisme

Neo - realisme mengasumsikan sistem internasional yang anarki memberikan pengaruh terhadap perilaku Negara.[[20]](#footnote-20) Neo - realisme (1979 - sampai sekarang) yang merupakan karya Kenneh Waltz. Perbedaannya dengan realis adalah tidak menyetujui penjelasan perilaku dalam hubungan internasional,dan tentu saja berusaha ilmiah dan lebih positivis karena neo-realis ingin mensistemasikan realisme politik ke dalam teori sistem yang kuat dan deduktif dari politik internasional. Neo - Realisme (disebut juga sebagai *Structural Realism*) Pada dasarnya substansi pemikiran kaum realis (klasik) masih menjadi dasar dalam pemikiran realisme baru (*Neo - Realisme*) ini. Perbedaanya dengan realisme klasik maupun realisme neoklasik adalah pendekatan dari dua paham realisme sebelum neorealis adalah pendekatan yang non - sistemik. Pendekatan non - sistemik yang dimaksud adalah, yang “dipersalahkan” atas segala chaos yang terjadi di dunia internasional adalah aktor (baik state sebagai aktor utama maupun sifat dasar manusia Animus Dominandi). Berbeda dengan pendahulunya, kaum neorealis lebih cenderung “mempersalahkan” sistem, sebagai faktor utama yang mendorong *state - actor*. Hal serupa juga diungkapkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya “Theo*ry of International Politics*”. Waltz menyatakan : *“The international structure acts as a constraint on state behaviour, so that only states whose outcomes fall within an expected range survive .”* Jadi, menurut hemat neorealis. Sistem internasional yang menentukan perilaku negara. Oleh karena sistem internasional (pada saat ini) dalam kondisi ketidakadaan *government above the states*, maka keadaan anarki yang menetukan perilaku setiap aktor - aktornya, dalam perspektif realisme disebut sebagai *state*. Dari sini *neo - realisme* berpandangan bahwa dimungkinkan adanya kerjasama didalam sistem yang anarki namun *relative gain* adalah tujuan dari negara-negara yang terlibat di dalamnya bukan *absolute gain* . Karena dalam suatu kerjasama dalam sistem anarki tidak ada badan supranasional yang bisa memberikan jaminan bahwa anggotanya tidak melakukan kecurangan satu dengan yang lainnya juga negara - negara yang terlibat didalamnya tidak dapat meramalkan apakah teman di masa sekarang tetap menjadi teman di masa yang akan datang, ada kemungkinan teman kita hari ini menjadi musuh kita dikeesokan hari. Maka dengan demikian negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut tidak akan rela apabila negara lain mengambil keuntungan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan, terutama bagi negara-negara yang memiliki power kuat, dia akan mempertahankan kondisi anarki dan kerjasama yang sedemikian, karena ia diuntungkan. Persamaannya dengan realis kontemporer yaitu anarki dan ketiadaaan lembaga sentral menjadi ciri struktur sistem, negara sebagai actor utama, bertindak dengan prinsip menolong diri sendiri dan mengusahakan agar bisa bertahan dengan kekuatannya, karena itu negara sama dalam tugas yang dihadapinya, yang berbeda adalah kapabilitas posisi negara dalam sistem dan distribusi dalam mendefinisikan sistem struktur. Perubahan dalam distribusi kapabilitas merangsang perubahan dalam struktur sistem seperti konfigurasi kekuatan multipolar ke bipolar atau menuju unipolar. Namun merebut kekuasaan dengan usaha internal seperti meningkatkan ekonomi, militer, strategi yang lebih pintar serta usaha eksternal seperti memperluas aliansi atau membubarkan aliansi musuhnya. tidak dianggap tujuan dan tidak lagi dilihat sebagai karakter manusia yang sangat dasar seperti dalam realisme klasik. Asumsinya adalah bahwasanya Keseimbangan kekuatan muncul secara otomatis dari instink kebutuhan dasar untuk bertahan. Permasalahan pertama ialah mengenai sifat dasar manusia. Kaum realis beranggapan bahwa pada dasarnya manusia itu bersifat egois dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepentingannya, meskipun itu artinya harus mengorbankan orang lain. Hal ini diilustrasikan oleh cerita stag hunt yang dikemukakan oleh Waltz mengutip Rousseau. Dikisahkan ada lima orang yang tersesat di pegunungan. Mereka kelaparan dan kemudian sepakat untuk bekerjasama menangkap rusa dewasa agar cukup untuk berlima. Kemudian muncul seekor rusa dengan anaknya. Karena berada dalam jangkauannya, salah seorang dari mereka menangkap anak rusa tersebut, dan tidak mempedulikan bahwa akibat perbuatannya sang rusa dewasa akhirnya lepas. Dia hanya mementingkan diri sendiri dan lupa dengan perjanjian sebelumnya. Realisme mengedepankan *survival* (usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup) dan *self help* (hanya mengandalkan diri sendiri dalam mencapai tujuannya di dunia yang anarkis). Sementara itu garis besar permasalahan kedua terletak pada masalah diplomasi dan *collective security*. Woodrow Wilson mengemukakan dalam *Fourteen Point*s - nya bahwa hendaknya praktik diplomasi dilakukan secara terbuka dan menggantikan praktik diplomasi rahasia, yang menghasilkan kesepakatan - kesepakatan rahasia antar - negara mengenai siapa yang akan mendapatkan wilayah apa pasca Perang Dunia Pertama. Aliran realis berpendapat bahwa dalam dunia politik internasional akan selalu ada kesepakatan - kesepakatan tertutup demi mencapai kepentingan nasional. Bahkan sampai sekarang praktik spionase masih terus berlangsung, meski dikategorikan sebagai tindakan yang buruk, tetapi dianggap bukan sesuatu yang salah. Kemudian realis juga tidak percaya bahwa organisasi internasional dan hukum internasional dapat mewujudkan perdamaian. Menurut mereka, negara - negara turut serta dalam organisasi internasional selama masih sejalan dengan kepentingan nasionalnya, bila tidak sejalan pasti akan mereka tinggalkan. Mengenai kegagalan organisasi internasional ini terbukti dengan kegagalan yang dialami oleh LBB itu sendiri. Kaum realis bepikiran bahwa perang yang tejadi adalah lebih karena sifat dasar manusia yang selalu ingin mengejar kekuasaan yang pada akhirnya sangat mudah menimbulkan agresi. Pemikiran tentang realisme ini hidup di atas perdebatan - perdebatan dan mengalami perubahan - perubahan konsep, dari realism klasik hingga akhirnya muncullah konsep baru yang biasa disebut neorealisme. Berawal dari konsep realisme klasik yang diprakarsai oleh Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes yang menggagas nilai - nilai realisme sebagai suatu paham yang percaya bahwa kondisi manusia adalah kondisi yang tidak aman dan berkonflik yang harus diperhatikan dan dihadapi, terdapat pula sekumpulan pengetahuan politik, atau kebijaksanaan, untuk menghadapi masalah keamanan, dan masing-masing dari mereka mencoba untuk mengidentifikasikan elemen- elemen pokoknya, serta tidak adanya pelarian akhir dari kondisi manusia yang merupakan bentuk permanen kehidupan manusia. Mereka menganggap politik dan sejarah politik sebagai siklus sebab dan akibat yang prosesnya dapat dianalisa dan dimengerti, tetapi tidak mungkin dipengaruhi secara intelektual. Konsep yang berkembang pada tahun 1930 - 1950-an yang memenangkan *Great Debate* Pertama ini diakui sebagai petunjuk paling baik dalam Hubungan Internasional karena terbukti benar adanya. kemampuan dominasi perspektif realisme mengenai keamanan ini juga ditunjukkan dengan caranya untuk beradaptasi dan menjawab kritik yang diberikan kepadanya. Kritik pertama adalah realisme dinilai tidak mampu menjelaskan perubahan-perubahan penting dalam sistem internasional seperti perubahan ide mengenai kedaulatan dari jaman medieval ke jaman modern, realis menjawab bahwa konsep kedaulatan boleh saja mengalami pergeseran namun pola mengenai *struggle for security* , pentingnya *power* , ancaman dan *balance of power* tetap sama dan signifikan. Kritik kedua adalah realisme dianggap mengabaikan pentingnya budaya dan identitas dalam politik internasional, realis merespon dengan menggaris bawahi bahwa biarpun terdapat perbedaan dalam budaya dan identitas, hal tersebut tidak menghalangi suatu negara untuk berperilaku sama seperti asumsi - asumsi realis. Kritik ketiga menyatakan bahwa realisme mengabaikan implikasi moral, realis merespon dengan penolakannya terhadap konsep kerjasama internasional dan realis menggarisbawahi bahwa mengenali batas - batas percobaan untuk mengubah politik internasional lebih baik daripada merubah sistem yang telah ada. Kritik keempat adalah mengutuk teori realis yang mengatakan bahwa negara adalah aktor penting dalam politik internasional padahal MNC dan aktor - aktor transnasional banyak bermunculan, realis menjawabnya dengan membuat perbandingan bahwa British East India Company atau VOC dimasa lalu lebih hebat dibanding MNC - MNC yang ada sekarang dan bahwa negaralah yang membuat regulasi untuk perusahaan multinasional, ditambahkan bahwa realis tidak menyatakan negara sebagai satu-satunya aktor namun sebagai aktor utama. Para pencetus neorealis seperti Kenneth Waltz menyebutkan bahwa bentuk dasar hubungan Internasional adalah struktur anarki yang tersebar di antara negara-negara. Negara - negara serupa dalam semua hal fungsi dasarnya. Pendekatan neoralis ini tidak menyediakan membahas pada sifat - sifat manusia seperti yang ada pada teori realis klasik, teori ini menekankan lebih pada struktur sistem. Noerealis juga mengilhami nilai - nilai yang bersifat lebih bersifat normatif. Menurut kaum realis, aktor - aktor selain negara tidak memainkan peran yang signifikan, atau setidaknya berada di bawah negara subordinat. Pemikiran realisme dapat dilacak hingga tulisan Thucydides, Machiavelli, Hobbes, dan Clausewitz. Realisme menekankan keutamaan peran negara di dalam hubungan internasional dan mensubordinatkan aktor - aktor lainnya. Oleh karena itu, realisme merupakan paradigma yang bersifat *state - centric*. Asumsi - asumsi realisme yang lain adalah negara bersifat manunggal atau unitary dan rasional, serta menekankan *power politics*. Dalam dinamikanya, kaum realis menekankan power sebagai tujuan maupun instrumen untuk mencapai tujuan. Model hubungan internasional menurut kaum realis adalah model bola biliard atau *billiard ball* . Realisme memandang mengenai negara yang manunggal dan rasional. Tindakan negara terkadang bukan merupakan representasi dari kepentingan negara secara keseluruhan, melainkan kepentingan pihak - pihak di dalam negara yang seringkali bertentangan satu sama lain. Negara sebagai aktor utama yang dimana aktor lain tidak memiliki signifikansi yang sama dengan *state*. Kedua, kadaulatan negara sebgai komunitas politik mandiri. Intinya dalam statisme ini, negara menjadi aktor utama yang paling dominan dalam dunia internasional dan proses dalam Hubungan Internasional. Dalam perspektif realis, sistem internasional adalah anarkis, yang lebih menggunakan pendekatan pada masalah kekuasaan dan keamanan. Interaksi sistem-negara di dunia lebih menitikberatkan pada keamanan nasional. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri dalam upaya mencapai dan melindungi kepentingan nasional. Sistem internasional yang bersifat anarkis, yaitu suatu ystem yang terdiri dari system-negara berdaulat yang tujuan utamanya adalah mempertahankan diri dan kepentingan nasionalnya Dalam perspektif ini, sistem dan perilakunya tidak mengenal batas - batas institusi internasional apapun, akibatnya setiap system diperhadapkan pada ketidakpastian tentang keamanan mereka. Paradigma realis memandang kemampuan nasional adalah kemampuan untuk memberikan perlindungan fisik dari ancaman luar, sehingga langkah-langkah yang biasa diambil adalah, meningkatkan kekuatan militer, membentuk aliansi, dan langkah strategis lainnya. Biasanya juga langkah - langkah seperti ini akan menimbulkan ambivalensi dikarenakan langkah-langkah seperti ini akan dipandang sebagai sebuah ancaman oleh ystem lain, dan akan menjadi sebuah ystem keamanan dalam hubungan antar Negara. Dengan pandangan seperti di atas, sistem realis melihat perang dan damai sebagai sebuah fenomena yang wajar dalam hubungan internasional. Stabilitas nasional dilihat sebagai sebuah fungsi keseimbangan kekuatan antar bangsa. Maka kekuatan militer akan merupakan unsur yang penting dari kekuatan sistem dalam interaksi internasional walaupun pada akhirnya dunia akan menuju kepada sistem bipolar kembali seperti layaknya perang dingin silam.

**“Realism emphasize the constraints on politics imposed by human selfishness (‘egoism’) and the absence of international government (‘anarchy’) which require ‘the primacy in all political life of power and security (Gilpin 1986: 305).”**

Teori ini, memandang bahwa pada dasarnya tiap - tiap individu itu *‘selfish’* dan selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara tak terkecuali pada perilaku Negara-negara di dunia. Realisme juga melihat dunia ini sebagai tempat yang anarki dimana masing - masing negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki kebebasan untuk mendapatkan kepentingannya sekalipun dengan cara-cara yang mengancam eksistensi dan keamanan actor lain. Realisme juga menekankan kepada dua hal penting yang harus dikejar oleh suatu Negara agar dapat *‘ survive ’* di lingkungan internasional yang anarki yaitu power dan *state security* . Power yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau kapasitas negara, merupakan hal terpenting yang harus dimiliki untuk dapat menjamin eksistensi negara, karena dengan power inilah suatu negara dapat menciptakan kemanan negaranya serta dapat *survive (state survival is paramount*). *“ Rationality and state - centrism are frequently identified as core realist Premises ” (Keohane 1986: 164-5).* Sebagaimana Realisme yag telah kita bahas, Premis utama yang ditekankan oleh teori realism ini adalah rasionalitas dan *“ state - centrism ”*. Rasionalitas merupakan dasar yang melandasi tindakan suatu aktor (negara sebagai pusat) atas pertimbangan untung rugi. Dalam teori ini diterangkan tentang pentingnya *cost* dan *benefit* dari suatu kebijakan negara, bahwasanya dalam suatu tindakan akan selalu ada *cost* dan *benefit* yang diperoleh, dan karena teori ini menekankan pada rasionalitas maka tentunya *benefit* yang diperoleh harus sesuai atau lebih besar daripada *cost* yang keluarkan. Selain aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki, sebuah sistem juga harus memperhitungkan aspek keamanan yang merupakan penjamin untuk suksesnya sebuah pertumbuhan ekonomi Faktor keamanan nasional sangat diperlukan agar para pelaku ekonomi dapat terus menanamkan modal dan usahanya.

1. Hubungan Diplomatik dan Smart Power

Hubungan diplomatik dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Syarat atau ciri pokok negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 (Huala Adolf : 1990) tentang hak dan kewajiban negara sebagai berikut : “Negara sebagai suatu pribadi Hukum Internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :

1. penduduk yang permanen ;

2. wilayah tertentu ;

3. suatu pemerintahan ; dan

4. kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain.”

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dewasa ini mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat internasional karena merupakan suatu bukti yang kuat atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut menumbuhkan persamaan kedudukan/persamaan derajat antar negara, sekaligus merupakan refleksi adanya kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam Pasal 74 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa termuat prinsip umum persahabatan antar negara yang didasarkan prinsip hidup bertetangga secara baik (*good neighbourliness*) dan harus diikuti oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Prinsip ini menjadi salah satu alasan atau dasar bagi negaranegara untuk mengadakan perjanjian dengan negara lain serta mengirim dan menerima perwakilan diplomatik dalam rangka mengembangkan hubungan lebih lanjut dalam berbagai bidang sesuai Hukum Internasional. Prinsip kesepakatan bersama dan prinsip resiprositas merupakan dua pilar utama untuk menegakkan hukum diplomatik, dari dua aspek tersebut masing-masing pihak akan saling menjaga, melindungi serta mengembangkan hubungan yang telah ada. Prinsip tersebut berlaku secara universal. Penyadapan ini dilakukan karena semua negara menyadari siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Atau setidak-tidaknya, negara tersebut bisa ikut berperan dalam persaingan global yang kian sengit. Dalam melakukan diplomasi, *power* merupakan salah satu hal yang krusial. *Power* merupakan sarana atau wadah dalam menunjukkan apakah negara yang bersangkutan memiliki kapabilitas atau tidak. *Power* yang berkembang, seperti sudah diketahui ada *hard power* dan *soft power. Hard power* dapat digambarkan sebagai sebuah kekuatan yang digunakan dengan cara paksaan atau identik dengan perang. Sebaliknya, *soft power* merupakan sebuah bentuk kekuatan yang digunakan dengan jalan kerjasama, diplomasi, atau dapat dikatakan bahwa *soft power* merupakan sebuah kekuatan yang identik dengan kegiatan berunding. Namun, belakangan ini muncul pula sebuah istilah *smart power*. Dimana istilah ini berhubungan dengan *soft power.* Jenis *power* ini identik dengan cara – cara yang lebih baik, dengan menggunakan *approaching* melalui sosial – budaya yang pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan politik sebuah negara. *Smart power* kental dengan peran Obama sebagai presiden Amerika Serikat dimana ialah yang pertama mencetuskan dan menggunakan *smart power* sebagai sarana berdiplomasi. Hal ini merupakan hal yang menarik pada era ini, karena dapat dilihat bahwa *smart power* merupakan sebuah hal yang baru dan menarik. *Smart power* juga merupakan hal yang efektif untuk menjadi pengantar dalam berdiplomasi. *Smart power* merupakan sebuah instrumen internasional yang merupakan perpaduan dari *soft power* dan *hard power* yang penggunaannya dilakukan secara bijak dan langgeng untuk mewujudkan sebuah manuver politik yang lebih baik dan efektif.[[21]](#footnote-21) Didalam *Smart Power* diplomasi bukan hanya didukung oleh kapabilitas militer saja, melainkan oleh pemanfaatan seluruh kapabilitas yang dimiliki Amerika Serikat seperti ekonomi, intelijen, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial – budaya, serta diplomasi damai lainnya. Untuk mencapai *smart power* itu Amerika Serikat harus menjalankan perannya sebagai pemimpin yang mengayomi, meski pada saat tertentu Amerika Serikat juga harus menjadi pemimpin yang tegas. Secara sederhana, Amerika Serikat harus pintar melakukan perubahan – perubahan dari *hard power* yang Amerika Serikat gunakan pada awalnya , kemudian diubah dan dibentuk menjadi bentuk baru yaitu *Smart Power*. Karena itu, di samping kekokohan kekuatan militer, Amerika Serikat juga perlu memberi perhatian terhadap kebutuhan publik global, menyediakan kebutuhan orang-orang dan pemerintahan di seluruh dunia yang tidak bisa mereka penuhi. Peran *smart power* juga sebagai “pengganti” dari *hard power* pada masa George W. Bush dimana pada masa pemerintahannya, ia terkenal sebagai orang yang menerapkan kekuatan yang kohersif kepada negara lain, Bush juga berani mengerahkan seluruh instrumen negaranya untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya, dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan konfrontasi dan membahayakan negara lain. Hal ini yang dianggap masyarakat dunia sebagai sesuatu yang buruk dan mengancam. Maka, terciptalah *smart power* pada masa Obama untuk menghapus citra buruk Amerika Serikat pada masa jabatannya. *Smart power* dianggap lebih efektif dan langgeng ketimbang *hard power* yang dijalankan pada masa pemerintahan Bush. Amerika Serikat memiliki *image* dan pengaruh yang besar yang sudah diakui didunia internasional harus mengatur stabilitas perannya dalam kancah global harus dapat berkembang dari citranya yang ditakuti menjadi negara yang menginspirasi dengan harapan dan optimismenya. Amerika Serikat harus menjadi kekuatan yang lebih cerdas dengan berinvestasi di global, baik menyediakan material, sumber daya manusia dan pemerintah di semua bagian dunia. Dengan melengkapi Militer Amerika Serikat dan kekuatan ekonomi dengan investasi yang lebih besar dalam *soft power*, Amerika bisa membangun kerangka kerja yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan dalam tantangan global. Saat pemerintah Amerika Serikat menggunakan *smart power* dalam menjalankan politiknya, hal ini akan membuat kancah internasional berpikir bahwa pemerintahan Amerika Serikat adalah pemerintahan yang terorganisir, terkoordinasi, dan dianggarkan. Presiden berikutnya harus mempertimbangkan nomor solusi kreatif untuk memaksimalkan kemampuan administrasi untuk mengatur kesuksesan negara tersebut, termasuk juga menunjukan personil senior yang dapat mencapai seluruh instansi untuk lebih menyelaraskan strategi dan sumber daya. Dalam kasus ini, *smart power* ingin dibuat menjadi sesuatu yang lebih langgeng, mengingat hal ini adalah strategi yang efektif untuk dibawa dalam kancah internasional.[[22]](#footnote-22)

1. Spionase

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.[[23]](#footnote-23) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diamdiam dan penyadapan itu sendiri memiliki berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.[[24]](#footnote-24) Penyadapan memiliki banyak istilah yang dipakai secara umum. Ada yang menyebut penyadapan dengan istilah *wiretapping*. *Wiretapping* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Pengertian dari *wiretapping* inilah yang menjadi dasar dari *interception*. Istilah *interception* merupakan perubahan dari istilah *wiretapping*. *Interception* berasal dari kata “*intercept*” yang dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tindakan penyadapan. Abdul Hakim Ritonga mengatakan bahwa penyadapan ialah tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.[[25]](#footnote-25) Jika dikaji lebih luas lagi penggunaan istilah “penyadapan” merupakan salah satu bentuk atau bagian tindakan spionase (*espionage*). Pengertian *espionage* adalah :

**“The act of securing information of a military or political nature that a competing nation holds secret. It can involve the analysis of diplomatic reports, publications, statistics, and broadcasts, as well as spying, a clandestine activity carried out by an individual or individuals working under secret identity to gather classified information on behalf of another entity or nation.”**

Atau,

**“is the practice of secretly gathering information about a foreign government or a competing industry, with the purpose of placing one's own government or corporation at some strategic or financial advantage.” [[26]](#footnote-26)**

Menurut Christopher D. Baker, *espionage* merupakan suatu tindakan memata-matai dan mendengarkan secara diam-diam terhadap “tetangga”. Jika dilihat menurut pandangan hubungan internasional maka negara memata-matai satu sama lain sesuai posisi kekuatan relatif mereka dalam rangka mencapai tujuan mementingkan diri sendiri.

Menurut *Black Law dictionary*, ada beberapa istilah yang terkait yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. *Espionage*

Bahwa kegiatan mata-mata adalah perbuatan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan, memindahkan ataupun menghilangkan keterangan berkaitan dengan pertahanan nasional dengan maksud keterangan itu dapat dipergunakan untuk merugikan negara atau untuk keuntungan bangsa lain.

1. *Spies*

Seseorangan yang karena pekerjaannya dikirim ke kamp musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan gerakan-gerakan musuh , untuk kemudian menyampaikan informasi secara rahasia ke pejabat yang berwenang.

1. *Clandestine*

Kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak sah.

1. *Intelligence*

Kegiatan intelejen diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan berita atau informasi mengenai hal-hal penting atau keterangan-keterangan rahasia. Yang membedakan spionase dengan bentuk pengumpulan informasi intelijen lainnya adalah bahwa spionase bisa mengumpulkan informasi dengan mengakses tempat di mana informasi tersebut disimpan atau orang yang mengetahui mengenai informasi tersebut dan akan membocorkannya melalui berbagai dalih.” Spionase dalam bahasan ini adalah aktivitas yang di lakukan oleh badan intelijen murni, bukan wartawan yang meliput berita untuk publik. Tetapi jika seorang wartawan memiliki misi ganda, maka etika kewartawananya musnah. Yang ada adalah intelijen bertopeng. Lebih lanjut, uraian tersebut memberi keterangan yang maknanya adalah : Spionase biasanya dianggap sebagai bagian dari upaya *institusional* (misal, pemerintahan atau badan intelijen). Istilah spionase pada mulanya dianggap sebagai suatu keadaan memata-matai musuh potensial atau aktual, terutama untuk tujuan militer, tetapi kini telah berkembang untuk memata-matai perusahaan, yang dikenal secara spesifik sebagai spionase industrial. Banyak negara secara rutin memata-matai baik musuh maupun aliansi mereka, walaupun mereka memiliki kebijakan untuk tidak berkomentar akan hal ini. Selain mempekerjakan agen-agen pemerintah sendiri, banyak yang juga menyewa perusahaan swasta untuk mengumpulkan informasi misalnya, SCG International Risk, BIN, FBI, CIA, KGB,NSA dan yang lainnya. *Kamus Hukum Black* (1990) mendefinisikan spionase sebagai :

**“mengumpulkan, mengirimkan, atau menghilangka informasi yang berhubungan dengan pertahanan nasional." Hingga disini penulis menemukan pergeseran makna awal spionase (espionnage) dari memata-matai, mengintai, menjadi arti yang lebih spesifik karena aktivitas tersebut di dasarkan pada satu motive, yaitu berdasarkan referensi *Kamus Hukum* *Black* (1990) tersebut.[[28]](#footnote-28)”**

Berkaitan dengan uraian di atas maka dapat ditarik beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Dalam kasus spionase yang dilakukan oleh NSA terhadap negara Jepang tersebut dapat dilihat bahwa sistem internasional dari negara Amerika Serikat yang bersifat anarki tanpa otoritas yang dapat menetapkan hukum, sistem tersebut mempengaruhi negara sebagai aktor rasional (memaksimalkan hasil dan meminimalkan kerugian), memanfaatkan NSA sebagai Badan Keamanan Nasional di Amerika Serikat demi kepentingan Amerika Serikat sendiri dengan melakukan penyadapan terhadap para pengusaha dan politikus di Jepang .
2. Dengan adanya sistem yang kompetitif maka perlu bagi negara untuk memiliki sistem persenjataan ataupun badan keamanan untuk bertahan dan dalam sistem yang anarki negara yang memiliki kekuatan maka akan memiliki pengaruh dan menunjukan sikap anarki yang mendorong negara untuk mengusahakan *power*, keamanan dan *survival*. Amerika Serikat menggunakan powernya untuk melakukan penyadapan terhadap negara sekutunya sendiri, untuk menunjukkan kapabilitas negaranya sebagai negara adidaya terhadap negara lain dengan kekuatan smart power melalui badan intelijen negara yaitu *National Security Agency*.
3. Bahwa kerjasama atau aliansi sulit untuk dilakukan kecuali ada keinginan dari negara itu sendiri untuk bekerjasama dan salah satu kepentingan negara adalah untuk mencegah negara lain memperoleh hasil yang lebih (*relative gains*), dalam kasus spionase ini dapat dilihat bahwa Amerika memiliki kepentingan lain dalam hal bekerjasama dengan Jepang dalam aliansi Trans – Pasifiknya dan tidak menghendaki kapabilitasnya sebagai negara adidaya tergeser oleh negara Jepang yang tergolong negara kuat dan maju dalam bidang teknologi dan ekonomi di Asia Pasifik .
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Jika spionase yang telah dilakukan oleh NSA (National Security Agency) yang merupakan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat terhadap negara Jepang sebagai negara sekutunya, maka akan merusak *legal of credence* dan merenggangkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dan negara Jepang.”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka  
penulis membuat definisi operasional variabel dan indikator pada halaman  
berikut :

**Tabel. 1 : Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Verifikasi**  **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**  **Jika spionase yang telah dilakukan oleh NSA (National Security Agency) yang merupakan Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat terhadap negara Jepang sebagai negara sekutunya** | 1. Tindakan spionase yang dilakukan oleh NSA terhadap Negara Jepang dari tahun 2006 - 2012. 2. Pembocoran informasi oleh Wikileaks terhadap negara sasaran spioanese yaitu Negara Jepang. | 1. Adanya tindakan spionase yang dilakukan oleh NSA terhadap Negara Jepang dari tahun 2006 - 2012, yang tidak diketahui oleh Negara Jepang dan baru disadari pada tahun 2015. (http://inspiratifnews.com/wikileaks-as-mata-matai-pemerintah-dan-perusahaan-jepang) 2. Adanya pembocoran informasi oleh Wikileaks terhadap negara sasaran spioanese yaitu Negara Jepang, yang menimbulkan kemarahan dari Perdana Menteri Shinzo Abe karena wujud kekecewaannya terhadap Amerika Serikat sebagai segara sekutu yang mulai banyak melakukan kerjasama / aliansi dalam hal militer maupun perdagangan saat ini. (http://inspiratifnews.com/wikileaks-as-mata-matai-pemerintah-dan-perusahaan-jepang) |
| **Variabel Terikat :**  **Maka akan merusak *legal of credence* dan merenggangkan hubungan diplomatik Amerika Serikat dan negara Jepang.”** | 1. Permintaan klarifikasi dari Shinzo Abe terhadap Amerika Serikat yang telah melakukan spionase. 2. Permintaan maaf Presiden Obama atas tindakan Spionase NSA. 3. Diplomasi yang tetap berjalan baik antara Negara Amerika Serikat dan Jepang. | 1. Adanya permintaan klarifikasi dari Shinzo Abe terhadap Amerika Serikat yang telah melakukan spionase, sebagai bentuk protes pemerintahan Jepang karena telah merasa dikecewakan Amerika Serikat. (http://m.detik.com/news/internasional//3001842/obama-minta-maaf-ke-jepang-soal-spionase-yang-dibocorkan-wikileaksp://) 2. Adanya permintaan maaf Presiden Obama atas tindakan Spionase NSA, sebagai bentuk itikad baik Negara Amerika Serikat terhadap Negara Jepang (http://m.detik.com/news/internasional//3001842/obama-minta-maaf-ke-jepang-soal-spionase-yang-dibocorkan-wikileaksp://) 3. Adanya diplomasi yang berjalan baik antara Negara Amerika Serikat dan Jepang, karena Jepang menerima permintaan maaf Amerika Serikat yang disampaikan Presiden Obama secara langsung terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe. (http://megapolitan.antaranews.com/berita/14860/barack-obama-minta-maaf-kepada-tokyo) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

**Gambar. 1 : Skema Kerangka Pemikiran**

Negara *core di Asia Timur*

Negara Adidaya dengan *smart power*

Jepang

Amerika Serikat

Hubungan Diplomatik, Melalui Diplomasi Ekonomi

Realisme Politik Amerika Serikat

Neorealisme Melalui Kepentingan Ekonomi dan bukan hanya Kepentingan Politik atau Militer

Smart Power Amerika Serikat

Spionase oleh NSA merupakan kegiatan intelijen Negara melalui Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Penggunaan tingkat analisis dalam studi hubungan internasional penting dilakukan untuk memudahkan memilih dam memilah masalah yang paling layak ditekankan atau yang dianalisis, serta untuk menghindari kemungkinan melakukan kesalahan metodologis yang disebut *fallacy composition* dan *ecological fallacy.[[29]](#footnote-29)* Ada tiga tingkat analisis yang umum digunakan dalam studi hubungan internasional, yaitu individu kelompok, Negara – bangsa , dan sistem regional dan global.[[30]](#footnote-30)

Untuk menetapkan jenis hubungan tingkat analisis harus dilihat dari hubungan antara unit analisis dengan unit eksplanasi, ada tiga unit yang dapat dilihat.

1. Analisis Reduksionis, yaitu unit eksplanasi pada tingkat yang lebih rendah.
2. Unit Korelasionis, jika unit eksplanasi dan unit analisisnya berada pada tingkatan yang sama.
3. Analisa Induksionis, apabila unit analisisnya pada tingkatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa induksionis, dimana Dampak Spionase NSA terhadap Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Jepang unit analisisnya berada tingkatan yang tinggi.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Artinya tidak boleh diisolasikan ke dalam variabel atau hipotesis.[[31]](#footnote-31) Eriyanto mengutip pendapat Cresswell, ada beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu pertama, penelitian kualitatif lebih memerhatikan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi pertisipasi di lapangan. Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar.[[32]](#footnote-32)

Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dapat dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu (1) Pengumpulan Data (*Data Collective*); (2) Pengolahan Data (*Data Analysis*); dan (3) Laporan Penelitian (*Report Writing*).[[33]](#footnote-33) Penggunaan metode kualitatif menjadi penulis dalam melakukan penelitian karena penulis menilai fenomena ini dapat diangkat menjadi bagian dari pelaksanaan diplomasi. Selain itu, berdasarkan penjelasan Neuman bahwa penelitian kualitatif cenderung lebih terbuka untuk menggunakan variasi bukti dan pengungkapan isu-isu. Untuk itulah penulis memilih metode kualitatif dalam penelitian mengingat pembahasan butuh gambaran yang jelas dalam memahami permasalahan yang ada. Dalam konteks studi komunikasi internasional, studi politik luar negeri merupakan studi yang sangat kompleks sifatnya, hingga dirasakan perlu untuk meminjam beberapa metode penelitian dalam artian metode yang di gunakan tidak tunggal. Penelitian ini menggunakan studi kasus (*case study*). Metode studi kasus melibatkan perolehan informasi yang cukup dan sistematis tentang sebuah lembaga atau institusi yang membolehkan peneliti secara efektif mengerti sebuah institusi yang mengeluarkan kebijakan luar negeri bekerja. Studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodelogis, namun lebih sebagai pilihan objek yang diteliti.[[34]](#footnote-34) Jika diidentifikasi ada tiga jenis kajian dalam studi kasus (*case study*). Jenis pertama adalah studi kasus instrinsik (*instrinsic case study*). Jenis ini ditempuh oleh peneliti yang ingin lebih memahami sebuah kasus tertentu. Jenis ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasus - kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau problem tertentu, namun karena, dalam keseluruhan aspek kekhususan dan kesederhanannya, kasus itu sendiri menjadi menarik minat. Kedua, studi kasus instrumental (*instrumental case study*). Jenis ini digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu agar terjadi sebuah perpektif tentang isu dan perbaikan suatu teori. Dalam hal ini, kasus tidak menjadi minat utama; kasus memainkan peran suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang sesuatu yang lain. Ketiga, studi kasus kolektif (*collective case study*). Jenis ini bukan berarti melakukan studi tentang kasus kolektif, namun lebih sebagai pengembangan dari studi instrumental ke dalam beberapa kasus.[[35]](#footnote-35) Dalam hal ini studi kasus yang dipilih tentunya adalah studi kasus yang kedua yakni studi kasus instrumental mengingat peneliti ingin melihat satu kasus ini melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang dalam menanggapi kemungkinan adanya konflik bilateral akibat kasus spionase yang dilakukan Amerika Serikat yang merupakan salah satu contoh konflik bilateral, antar dua negara.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat kualitatif meliputi teknik reduksi data, organisasi data dan interpretasi. Penulis akan menggunakan studi literatur sebagai acuan utama untuk memperoleh data dan gambaran menyeluruh mengenai isu yang diangkat dalam skripsi ini. Beberapa buku dan jurnal ilmiah akan dipergunakan untuk membentuk argumentasi dalam pembahasan masalah di dalam skripsi. Jurnal yang diakses berasal jurnal – jurnal penelitian Asia Timur yang ditemukan di situs online. Artikel berita online akan dimanfaatkan sebagai data pendukung dari argumentasi yang dibuat dalam skripsi, mengingat isu dan tenggang waktu kasus yang diangkat dalam skripsi ini yang tergolong baru.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksakan dari beberapa lokasi seperti perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengantujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. **Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan**

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung

1. **Rektorat Universitas Pasundan**

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193, Bandung

1. **Perpustakaan Universitas Parahyangan**

Jl. Ciumbuleuit 94, Bandung Jawa Barat

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakandalam kurun waktu enam bulan terhitung sejak Bulan Oktober 2015 sampai April 2016.

1. **Sistematika Penulisan**

Secara Umum, penulisan skrispsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab – bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penuilisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Dalam Bab I ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub – sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan table lamanya penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variable bebas. Yaitu Latar Belakang Negara Melakukan Spionase, Spionase sebagai Bentuk Intelejen Negara, Sejarah NSA (National Security Agency).

**BAB III** Dalam Bab III ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variable lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variable terikat adalah Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Jepang. Maka, hal – hal yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah Sejarah Hubungan Aliansi Amerika Serikat dan Jepang, Kekuatan Jepang di Asia Timur, Relasi dengan Amerika Serikat Hingga Kemundurannya, dan Hubungan Amerika Serikat Dan Jepang Dalam Bidang Ekonomi Dan Militer

**BAB IV** Dalam Bab IV ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan identifikasi masalah yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V** Dalam Bab V ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Soesastro, Hadi dan AR Sutopo. 1981. Strategi dan Hubungan Internasional. Jakarta: CSIS. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kegley, Charles Jr dan Eugene R Witkopf. 1993. *World Politics.* New York: St Martin’s Press. [↑](#footnote-ref-2)
3. Oxford: Oxford University Press, Hlm. 346-372 Tjeng, Lie Tek. 1983. Studi Wilayah Pada umumnya Asia Timur Pada Khususnya. Bandung : Penerbit Alumni. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rudy, Teuku May Drs SH MA MIR. 1997. Studi Kawasan. Bandung : Bina Budhaya. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wijaya, Agoeng. 2009. “ASEAN +3 dan kelanjutan Krisis Moneter” dalam Tempo, 14

   April 2009. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hurst, Steven R. & Gearan, Anne. 2010. *“Obama Makes Non-nuke Pledge to World Leaders”* dalam The Jakarta Post, 13 April hal.10 [↑](#footnote-ref-6)
7. Suwardi Wiriadmadja, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*´ (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm.36 mengutip pengertian Hubungan Internasional dari Trygive Mathison dalam bukunya ʊ*Methodology in the Study of International Relations*´ [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,*hlm. 191. [↑](#footnote-ref-8)
9. Donnelly, Jack. *Theories of International Relations. Realism.* [↑](#footnote-ref-9)
10. Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kusumohamidjojo Budiono.1987. Hubungan Internasional : Kerangka Studi Analitis. Jakarta : Binacipta [↑](#footnote-ref-11)
12. Jackson, Robert & George Sorensen. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. [↑](#footnote-ref-12)
13. Article di kolom realism http://portal-hi.net/ index.php/teori-teori-realisme/107-menakar- relevansi-teori-*balance-of-power.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Peter Permonte http:// pjvermonte.wordpress.com/2015/10/27/membaca- lagi-paradigma-realisme. [↑](#footnote-ref-14)
15. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: gramedia pustaka utama. [↑](#footnote-ref-15)
16. Scott Burchill, Andrew Linklater dkk. , ‘*Theories of International Relations, Third Editions’*, 2005, Palgrave Macmillan, hlm.29-53. [↑](#footnote-ref-16)
17. Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung : Abardin. [↑](#footnote-ref-17)
18. . Jack C. Plano dan Roy Olton*, Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), hlm. 17, dalam *ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
19. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakart : gramedia pustaka utama. [↑](#footnote-ref-19)
20. Scott Burchill, Andrew Linklater dkk. , ‘*Theories of International Relations, Third Editions*’, 2005, Palgrave Macmillan, hlm.29-53. [↑](#footnote-ref-20)
21. Nye, Joseph. 2004. *“Soft Power”* [↑](#footnote-ref-21)
22. Armitage, Richard, Nye, Jr, Joseph. 2007. *“CSIS On Smart power – A Smarter, More Secure”* [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. [↑](#footnote-ref-23)
24. Anonymus, 2013, ***Espionage***, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/espionage> (online), diakses pada 18 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-24)
25. Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 91- 92. [↑](#footnote-ref-25)
26. Anonymus, 2013, *Espionage*, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/espionage> (online), diakses pada 18 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-26)
27. Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael G. Nainggolan, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta, 1999, hlm. 91-92. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jurnal Spionase dan Implikasi Hubungan Luar Negeri hlm. 3 - 4. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mohtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan metodologi”, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.208 – 209. [↑](#footnote-ref-29)
30. Untuk melihat jenis – jenis isu dan fenomena hubungan internasional/ politik internasional masuk pada tingkat analisis yang mana sebaiknya baca buku Mohtar Mas’oed , Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa Teorisasi (Yogyakarta : PAU Studi sosial UGM. 1989), juga bukunya A. Valendana *Theory of International Politic* (Kampur, India: Vikas Publishing co.Ltd, 1996), khususnya bab *Level of Analisis*. [↑](#footnote-ref-30)
31. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2011), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-31)
32. Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-32)
33. John W Cresswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (California: Sage Publications, 1994), hlm. 148-161. [↑](#footnote-ref-33)
34. Robert E. Stake, *Case Study, dalam Handbook of Quaklitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 299. [↑](#footnote-ref-34)
35. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 300-301. [↑](#footnote-ref-35)